



STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA:

**Rekomendasi Berdasarkan Hasil Survei
Daring September-Oktober 2020**

**Kertas Kebijakan
*Policy Paper***

Pusat Penelitian Ekonomi
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2020

Policy Paper 2020

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA: REKOMENDASI BERDASARKAN HASIL SURVEI DARING SEPTEMBER - OKTOBER 2020

TIM PENULIS

- Editor** : Chitra Indah Yuliana, Achsanah Hidayatina
Purwanto dan Esta Lestari
- Ketua Tim** : Purwanto
- Anggota** : ✓ Esta Lestari
✓ Chitra Indah Yuliana
✓ Achsanah Hidayatina
✓ Felix Wisnu Handoyo
✓ Nur Firdaus
✓ Atika Zahra Rahmayanti
✓ Eka Nurjati
✓ Bintang Dwitya Cahyono
✓ Rio Novandra
✓ Alan Ray Farandy

ISBN: 978-602-6303-16-5

© Pusat Penelitian Ekonomi, Kedeputan Bidang IPSK - LIPI
iii + 27 hlm; 21 x 29,7 cm | Cetakan I, 2020

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E - LIPI)
Gedung Widya Graha Lt. 4 & 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10
Jakarta Selatan, 12710 Telp: 021 - 5207120
Email : ekonomi@mail.lipi.go.id
Website : ekonomi.lipi.go.id
Instagram : ekonomi_lipi
Youtube : p2ekonomi lipi
Facebook : ekonomiLIPI

KATA PENGANTAR

Kertas kebijakan (*policy paper*) ini disusun berdasarkan kajian cepat melalui survei daring tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Survei daring dilakukan oleh tim kajian dari Penelitian Ekonomi (P2E), Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada periode survei 15 September - 5 Oktober 2020. Pandemi COVID-19 yang masih menjadi permasalahan global hingga saat ini memerlukan berbagai cara atau strategi untuk mengatasi dampak yang muncul yang salah satunya adalah tentang kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Rekomendasi kebijakan yang disusun didasarkan pada hasil kajian tentang kondisi ketahanan pangan rumah tangga dan strategi-strategi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan selama masa pandemi COVID-19. Meskipun hasil survei secara umum menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga cukup baik, tetapi terdapat cukup banyak rumah tangga yang berada dalam kondisi ketahanan pangan rendah terutama pada karakteristik rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpenghasilan tidak tetap, bekerja di sektor informal, dan dengan pengeluaran rumah tangga per bulannya rendah. Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk program perlindungan sosial di masa pandemi baik berupa bantuan secara tunai maupun non tunai dan manfaatnya diakui oleh masyarakat. Namun demikian, mempertimbangkan permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran program perlindungan sosial tersebut. Tim Peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi dalam paparan singkat ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah terkait dengan upaya penguatan ketahanan pangan rumah tangga hingga masa pandemi COVID-19 ini nantinya benar-benar teratasi dengan baik.

Semoga kertas laporan rekomendasi kebijakan yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga terkait. Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak atas terselenggaranya kajian ini. Terlebih, rasa terima kasih terbesar kami sampaikan bagi semua penulis dan khususnya Kepala Pusat Penelitian Ekonomi dengan tersusunnya kertas laporan rekomendasi strategi kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia.

Jakarta, 30 Desember 2020
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| 1.1. KONDISI MAKRO EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19..... | 1 |
| 1.2. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA: KERANGKA ANALISIS DAN METODOLOGI..... | 5 |
| 1.3. PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELUARAN DAN PERUBAHAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA..... | 8 |
| 1.4. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19..... | 12 |
| 1.5. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DENGAN COMORBID DAN KASUS POSITIF COVID-19..... | 17 |
| 1.6. STRATEGI PEMENUHAN PANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19..... | 19 |
| 1.7. BANTUAN SOSIAL DI PANDEMI COVID-19..... | 21 |
| 1.8. REKOMENDASI KEBIJAKAN..... | 23 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 26 |

1.1. KONDISI MAKRO EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19¹ telah mengubah skenario perencanaan pembangunan Indonesia. Peningkatan jumlah kasus dan perluasan penyebaran pandemi COVID-19 hampir di seluruh wilayah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sejak Triwulan II sebesar 5,32% dan kondisi resesi ekonomi di Triwulan III 2020 dengan lanjutan kontraksi ekonomi 3,49% (BPS, 2020). Adanya optimisme perbaikan kondisi perekonomian di Triwulan IV harus berhadapan dengan realitas meningkatnya kasus harian COVID-19 yang sudah mencapai angka 7.000an kasus positif². Skenario pemulihan ekonomi di tahun 2021 masih harus diuji dengan kemampuan pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19 ini dengan adanya rencana vaksinasi massal di tahun 2021 yang masih dalam pematangan proses pelaksanaannya.

Lumpuhnya sektor-sektor ekonomi produktif di sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan, transportasi, dan pariwisata telah berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan yang mengalami rasionalisasi berupa pengurangan tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya sumber pendapatan

sebagian masyarakat yang terdampak langsung melalui pengurangan jam kerja hingga penghentian hubungan kerja (PHK) yang tidak dapat dihindari. Bappenas (2020a) mencatat adanya 2,56 juta orang menjadi pengangguran³, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja⁴, dan 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19.

Akibat lanjutannya adalah terjadi penurunan pendapatan rumah tangga, bertambahnya pengangguran, dan meningkatnya rumah tangga yang berada dalam kondisi kemiskinan. Pemerintah (melalui BPS) baru akan merilis angka kemiskinan bulan September 2020 pada awal tahun 2021 dan diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin dengan prosentase penduduk miskin pada kisaran 2 digit (sekitar 10-12%⁵) atau meningkat dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2020 yang mencapai 26,4 juta jiwa⁶ atau 9,78% dari penduduk Indonesia. Bappenas (2020c) memperkirakan prosentase penduduk miskin sebesar 10,2%, INDEF⁷ (2020) memperkirakan di angka 10,34%, SMERU⁸ (2020) memperkirakan penambahan prosentase penduduk miskin menjadi 12,4%, dan Bank Dunia⁹ (2020)

¹ WHO menyatakan pandemi COVID-19 sebagai krisis kesehatan global pada 31 Januari 2020 dan kasus pertama terkonfirmasi positif di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020.

² Kasus positif COVID-19 pada tanggal 29 Desember 2020 sebanyak 7.903 kasus atau tertinggi kedua setelah kasus pada tanggal 3 Desember yang mencapai 8.369 kasus positif dengan rata-rata kasus harian di bulan Desember 2020 sebanyak 6.480 kasus per hari atau tertinggi dibandingkan bulan lainnya sepanjang tahun 2020 (data kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dikutip dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses tanggal 29 Desember 2020)

³ Pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti kerja akibat pandemi COVID-19 selama bulan Februari - Agustus 2020

⁴ Penduduk yang bekerja namun sementara tidak bekerja karena pandemi COVID-19

⁵ Perkiraan prosentase penduduk miskin tahun 2020 disampaikan oleh beberapa instansi dan lembaga seperti Bappenas, Bank Dunia, SMERU, dan INDEF.

⁶ Perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara tahunan dipublikasikan 2 kali yaitu pada kondisi bulan Maret dan September setiap tahunnya. Angka penduduk miskin bulan Maret 2020 telah dipublikasikan oleh BPS

pada 15 Juli 2020 sehingga rilis angka kemiskinan kondisi September 2020 diperkirakan akan dilakukan di bulan Januari 2021

⁷ Sumber tersedia online di <https://www.antarane.ws.com/berita/1713870/peneliti-perkiraan-kemiskinan-september-2020-naik-jadi-1034-persen>, diakses tanggal 10 Desember 2020

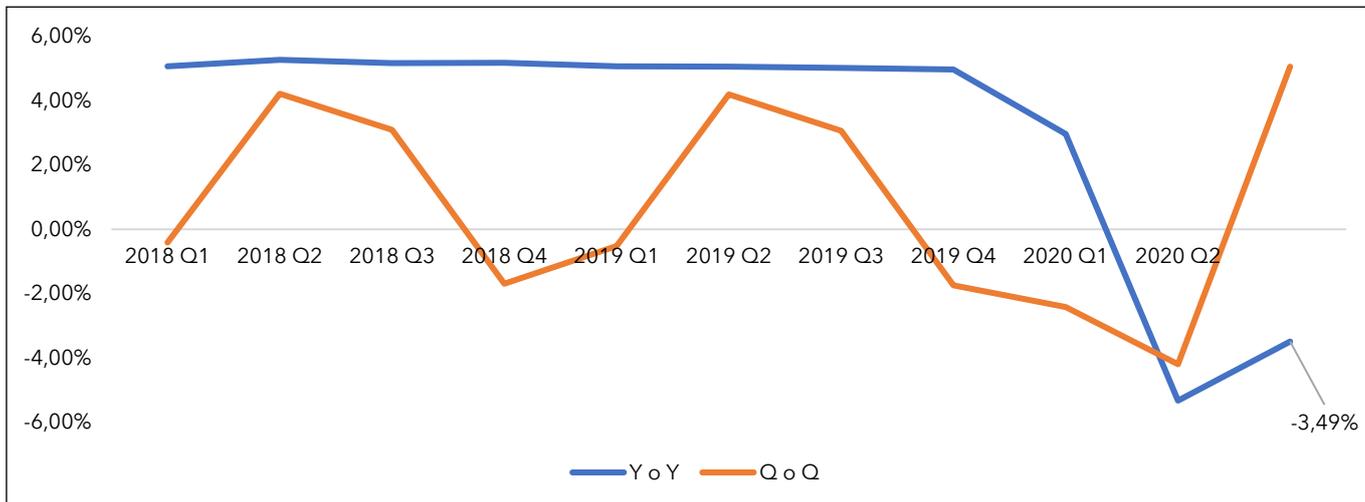
⁸ SMERU menggunakan prediksi kenaikan angka kemiskinan berdasarkan kondisi kemiskinan sebelum tahun 2020 (tidak termasuk data kemiskinan pada Maret 2020), sumber data dan informasi tersedia online di <https://smeru.or.id/id/content/estimasi-dampak-pandemi-covid-19-pada-tingkat-kemiskinan-di-indonesia>, diakses tanggal 10 Desember 2020

⁹ Bank Dunia menyampaikan proyeksinya pada bulan Juni 2020 atau sebelum rilis angka kemiskinan Indonesia Maret 2020 yang disampaikan oleh BPS (2020) di bulan Juli 2020 yang berarti prediksi kenaikan penduduk miskin menggunakan basis data

memperkirakan ada peningkatan 2,1-3,6% atau berarti sekitar 11,32-12,82% penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19.

Prediksi-prediksi peningkatan angka kemiskinan membuat kondisi kerentanan masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan menjadi

kondisi kesehatan, pengetahuan tentang pangan dan gizi, perilaku dan pola konsumsi pangan, serta preferensi diet dari masing-masing orang. Artinya, orang dengan kondisi kesejahteraan yang baik akan dapat mengalami masalah ketahanan pangan apabila pola dan perilaku konsumsi pangannya tidak baik.



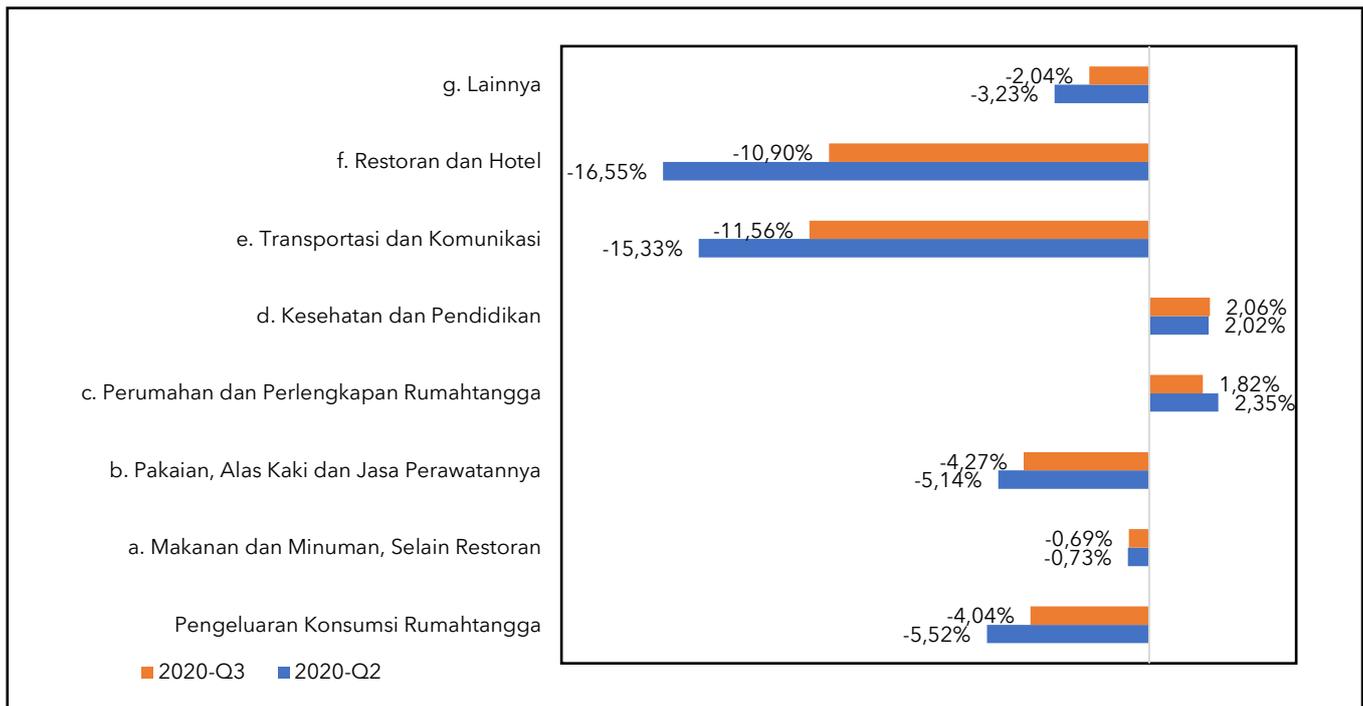
Sumber: BPS, 2020, diolah

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 - 2020 (year on year dan quarter to quarter)

mengkhawatirkan. Penduduk miskin akan mengalami berbagai persoalan yang tidak hanya menjaga diri mereka dari resiko penularan COVID-19 tetapi juga pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar khususnya pangan di masa pandemi ini. Ketahanan pangan Indonesia sebelum pandemi tercatat berada di peringkat 70 dari 103 negara dengan nilai indeks 20,1 menurut *Global Hunger Index* dan di peringkat 62 dari 113 negara dengan nilai indeks 62,6 menurut perhitungan *Global Food Security Index* tahun 2019. Berbekal dari kondisi ketahanan pangan secara nasional tersebut, kemungkinan ancaman kerawanan pangan di masa pandemi COVID-19 akan dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, persoalan ketahanan pangan juga tidak hanya disebabkan oleh daya beli saja melainkan juga dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas wilayah,

kemiskinan pada September 2019, sumber data dan informasi tersedia online di <https://www.antaraneews.com/berita/1529928/bank-dunia->

[perkiraan-penduduk-miskin-ri-bertambah-96-juta-orang.](https://www.antaraneews.com/berita/1529928/bank-dunia-) diakses tanggal 10 Desember 2020



Sumber: BPS, 2020, diolah

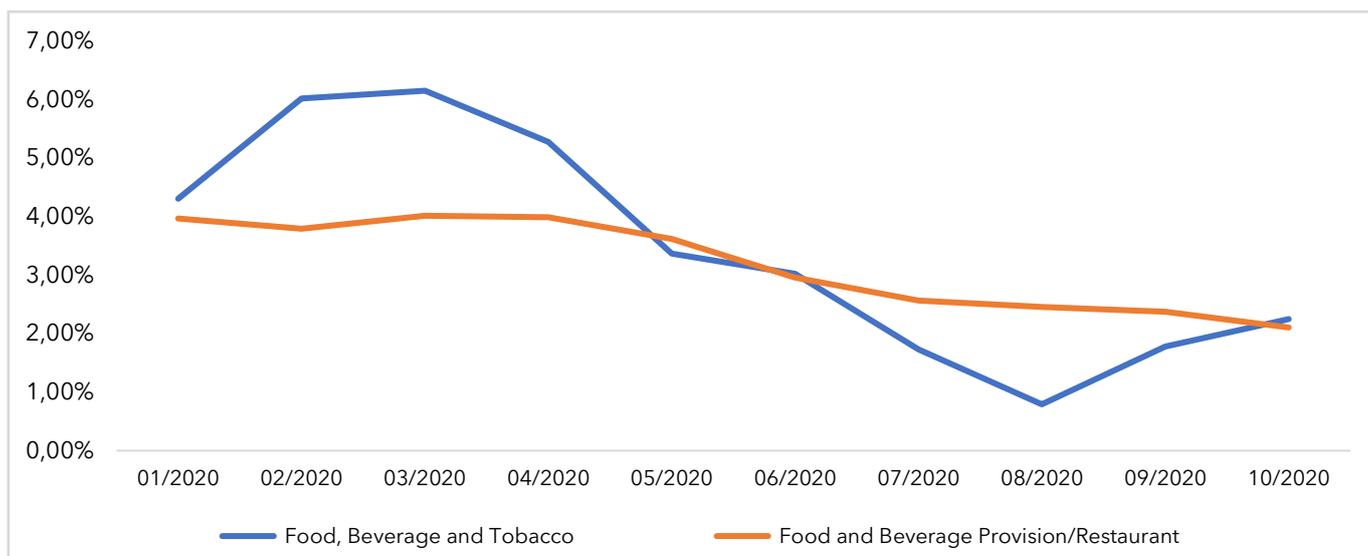
Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2020, Triwulan I - III

Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga di masa pandemi juga mengalami penurunan dalam kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional dari rata-rata sebesar 56-57% menjadi sebesar 53-54% selama masa pandemi COVID-19. Kerawanan pangan dapat terjadi bila produksi, distribusi, dan konsumsi pangan terganggu sehingga aksesibilitas pangan bagi rumah tangga menjadi menurun. Permasalahan aksesibilitas terhadap pangan meliputi ketersediaan produk dan keterjangkauan harga pangan terutama bagi kelompok rumah tangga yang paling terdampak secara ekonomi.

Saat ini tercatat tingkat inflasi tahun kalender Indonesia (Januari - November) 2020 berada pada 1,23 persen dan tingkat inflasi *year on year* (YoY) sebesar 1,59 persen (BPS, 2020).

Secara khusus, inflasi komponen makanan pergerakannya cenderung fluktuatif (Gambar 3), dimana untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau sepanjang Maret hingga Agustus 2020, mengalami tren yang cenderung menurun

dari 6,15 persen menjadi 0,79 persen. Namun kembali mengalami peningkatan dari Agustus hingga Oktober 2020 (2,25 persen). Pada komoditas pangan seperti beras Medium kualitas I, pergerakan harga mulai terlihat dari bulan Januari 2020. Selama pandemi (Maret hingga Juli), harga beras mengalami volatilitas yang relatif lebih berfluktuatif. Namun harga beras jenis ini termasuk relatif stabil tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional, rata-rata harga beras tipe Medium pada 17 April 2020 berada pada level Rp 11.945/kg. Sementara harga eceran tertinggi untuk beras jenis ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 57 tahun 2017 sebesar Rp 9.450/kg. Fluktuasi harga yang relatif terkendali ini juga terjadi pada komoditas pangan lainnya seperti telur ayam ras segar, daging sapi, daging ayam, minyak goreng kemasan bermerk I dengan kecenderungan mengalami penurunan pada semester II atau setelah bulan Juli tahun 2020 (PIHPS, 2020). Kenaikan harga yang cukup tinggi terjadi pada

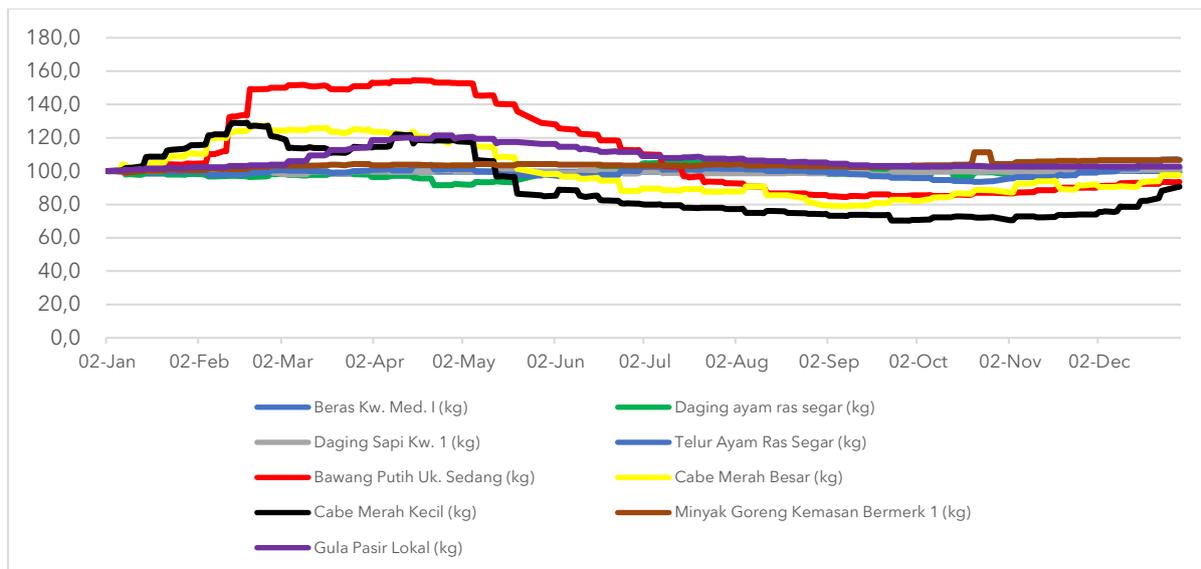


Sumber: BPS, 2020, diolah

Gambar 3. Tingkat Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

komoditas bawang putih ukuran sedang, cabe merah besar dan kecil, serta gula pasir lokal dan berlangsung pada periode awal Februari hingga pertengahan Juli saja (PIHPS, 2020). Kenaikan harga beberapa komoditi tersebut mulai bergerak naik sejak awal Januari hingga munculnya pernyataan WHO mengenai pandemi COVID-19 sebagai krisis kesehatan global pada 31 Januari 2020. Pada saat munculnya kasus pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret, harga bawang putih sudah melonjak 0,6 kali lipat dibandingkan harga pada 2 Januari 2020. Selanjutnya dengan adanya penerapan PSBB pertama kalinya di Jakarta pada tanggal 10 April 2020 kemudian diikuti dengan masuknya bulan Ramadhan 24 April hingga masa hari raya Idul Fitri, harga komoditas pangan bawang putih, cabe merah, dan gula pasir tetap masih relatif tinggi. Namun seiring dengan adanya perubahan status PSBB menjadi PSBB transisi yang dilakukan di Jakarta mulai 5 Juni 2020, harga-harga komoditas pangan mulai mengalami penurunan dan cenderung tidak ada kenaikan harga yang signifikan hingga akhir tahun 2020. Ulasan gambaran makro ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan juga modal awal kondisi ketahanan pangan menjadi

rangkain informasi penting dalam upaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terpuruk terlalu dalam di masa krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini. Hal ini dikarenakan pemerintah juga harus tetap menjaga arah dan tujuan pembangunan nasional yang salah satunya adalah memenuhi *The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau dikenal dengan target *sustainable development goals* (SDGs) (United Nation, 2015). Tujuan SDGs yang paling erat berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di masa pandemi adalah tujuan dari SDG-1 dan SDG-2 yaitu tidak ada lagi kemiskinan (*no poverty*) dan tidak ada lagi kelaparan (*no hunger*). Berdasarkan data Bappenas (2020a), kondisi pandemi COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia yang tentunya menimbulkan adanya kekhawatiran meningkatnya kerawanan pangan. Oleh karena itu, adanya kajian yang menganalisis kondisi ketahanan pangan di level rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 sangat penting dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari masyarakat terkait kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangannya.



Sumber: PIHPS 2020, diolah (harga komoditas 2/01/2020 = 100)

Gambar 4. Pergerakan Harga Beberapa Komoditas Pangan di Indonesia (Januari - Desember 2020)

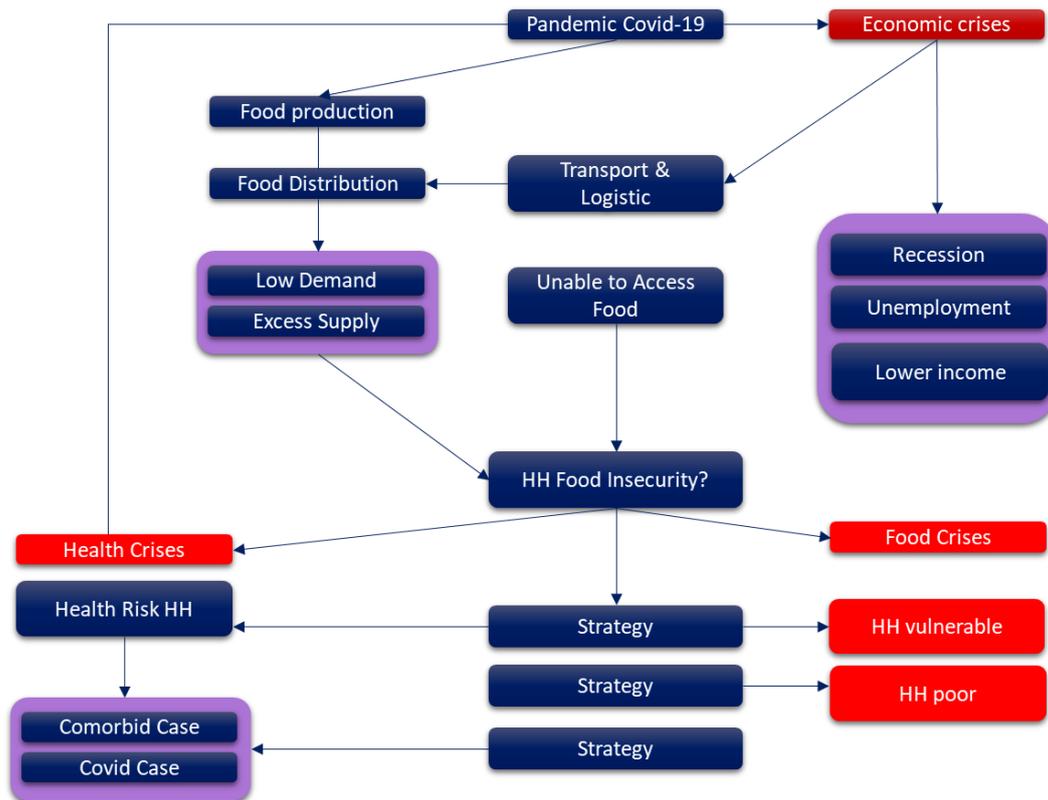
1.2. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA: KERANGKA ANALISIS DAN METODOLOGI

Pandemi COVID-19 telah membawa Indonesia pada resesi ekonomi (BPS, 2020). Resesi ini paling besar dikontribusikan dari menurunnya kegiatan ekonomi yang menyebabkan lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan. Sektor pertanian termasuk salah satu sektor yang terdampak lebih kecil dibandingkan sektor lainnya (Bank Dunia, 2020), namun memiliki dampak lanjutan yang signifikan terhadap kesejahteraan baik bagi petani maupun konsumen.

Produksi komoditas pangan yang menurun akibat hambatan disisi input, diikuti juga oleh pembatasan mobilitas orang menyebabkan terganggunya saluran distribusi dan transportasi bahan pangan yang mengancam terjadinya krisis pangan dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan. Lebih lanjut, ketahanan pangan rumah tangga diperkirakan menurun karena ketersediaan dan akses pangan yang terbatas sehingga memicu krisis kesehatan yang disebabkan oleh meningkatnya angka kesakitan (morbiditas)

dan kematian (mortalitas) baik secara langsung akibat COVID-19 maupun tidak langsung seperti menurunnya daya tahan tubuh. Selain itu, dampak jangka panjangnya terhadap ketahanan gizi masyarakat rentan terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia juga perlu mendapat perhatian.

Mekanisme masyarakat dalam beradaptasi ditengah ancaman tersebut menjadi perhatian utama studi ini dengan menggali dinamika rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangannya termasuk dalam konteks adaptasi komunitas dan bagaimana peran intervensi pemerintah dalam berbagai skema yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga selama periode pandemi COVID-19.



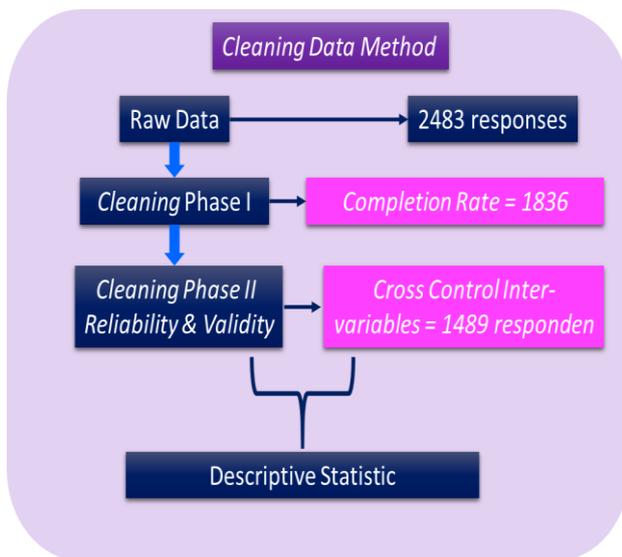
Gambar 5. Kerangka Analisis

Mobilitas sumberdaya mengalami restriksi selama masa pandemi turut membatasi aktivitas penelitian. Namun pandemi juga telah membuka peluang pendekatan lain dalam penelitian melalui optimalisasi teknologi salah satunya survei daring. Kekuatan utamanya adalah kecepatan survei dan cakupan responden yang lebih luas.

Studi ini menasar responden rumah tangga selama rentang waktu tiga (3) minggu dari 15 September hingga 5 Oktober 2020. Selain melalui survei daring, studi ini juga ditunjang oleh kajian literatur dan diskusi kelompok terarah dengan beberapa pakar untuk menggali informasi terkait sosio-demografis masyarakat dan kaitannya dengan pola belanja dan pola konsumsi pangan. Survei online berhasil menjangkau lebih dari 2.400 responden rumah tangga berusia diatas 17 tahun namun sekitar 62% hasil kuesioner yang berhasil dimanfaatkan secara utuh dalam

analisis (1.489 responden). Salah satu kelemahan studi ini adalah kurang optimalnya proses verifikasi sebagaimana layaknya wawancara tatap muka sehingga konsistensi jawaban sulit dikontrol dan validitas hasil lebih sulit tercapai. Untuk meminimalisir hal tersebut, kontrol dilakukan dengan mendesain daftar pertanyaan yang bersifat langsung serta ditunjang dengan konfirmasi melalui wawancara lanjutan via telepon kepada sekitar 1,5% responden yang merepresentasikan karakteristik responden berdasarkan lokasi tempat tinggal (desa dan kota), tingkat pengeluaran konsumsi per bulan, tingkat pendidikan, dan kondisi ketahanan pangannya.

Definisi ketahanan pangan yang digunakan merujuk pada UU No. 18/2012¹⁰ yang juga sejalan dengan definisi LSRO (1990). Namun studi ini ditujukan pada unit rumah tangga dengan mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik¹¹. Dalam mengukur ketahanan pangan rumah tangga, studi ini mengadopsi pengukuran ketahanan pangan rumah tangga dari USDA (2000), yang membagi ketahanan pangan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga tahan pangan dan rumah tangga rawan pangan.



Gambar 6. Proses *Cleaning Data* hasil Survei

Rumah tangga rawan pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu rawan pangan tanpa kelaparan, rawan pangan dengan kelaparan moderat, dan rawan pangan dengan kelaparan akut.

Terminologi kerawanan pangan dan kelaparan yang digunakan disini adalah kondisi yang diakibatkan oleh kendala sumber daya finansial dan bukan faktor lain,

seperti kondisi sedang diet atau kesibukan tertentu yang menyebabkan tertundanya makan (USDA, 2000). Dengan kata lain, pengukuran yang dilakukan hanya berkaitan dengan kerawanan pangan dan kelaparan yang terjadi karena rumah tangga tidak memiliki cukup makanan atau uang untuk membeli makanan.

Hal ini kemudian direpresentasikan oleh seperangkat kelompok pertanyaan yang bersifat *affirmative* dan *self-assesment* terhadap kecukupan makanan yang mewakili seluruh rumah tangga, keberadaan anggota rumah tangga dewasa, dan anak-anak untuk kemudian ditransformasi menjadi nilai skor yang mewakili status ketahanan pangan rumah tangga.

Cakupan studi ini meliputi seluruh wilayah pulau-pulau besar di Indonesia, namun hampir 75% responden berasal dari wilayah Jawa. Sebaliknya Indonesia Timur, yaitu Maluku dan Papua hanya berhasil menjangkit sekitar 2% responden. Karakteristik survei daring menyebabkan kecenderungan responden untuk terkonsentrasi pada wilayah perkotaan (77%) dan pada mereka yang relatif melek teknologi. Hal ini berimplikasi pada konsentrasi responden pada kelompok usia produktif (30-39 tahun) sebanyak lebih dari 44% dan berpendidikan Sarjana (49%). Oleh karena itu, salah satu limitasi penting yang perlu diakui adalah hasil studi ini tidak mewakili genalipsis kondisi ketahanan pangan seluruh rumah tangga di Indonesia melainkan pada populasi sampel responden yang diperoleh melalui metode daring saja.

¹⁰ Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

¹¹ Seorang atau sekelompok yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

1.3. PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELUARAN DAN PERUBAHAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA

Pandemi COVID-19 telah berdampak juga terhadap sektor ekonomi. Sejak COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang disebut Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Kebijakan ini berimplikasi terhadap penutupan sebagian besar lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, dan sekolah dengan menerapkan sistem bekerja dan belajar di rumah.

Sayangnya, kebijakan tersebut juga diiringi dengan penurunan pendapatan sebagian besar rumah tangga Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan pembatasan masyarakat untuk beraktivitas keluar rumah, sehingga mempengaruhi kinerja di sektor-sektor tertentu baik formal maupun informal. Usaha besar dan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) telah mengalami penurunan kinerja yang dicerminkan melalui penurunan pendapatan. Banyak usaha yang mengurangi jumlah karyawan dan memperhentikan karyawan sebagai strategi bertahan, bahkan tidak sedikit juga perusahaan yang menutup usahanya.

PSBB menyebabkan perubahan pola pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan yang bersifat mendasar dan produk ataupun jasa yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh.

Berdasarkan penelitian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI memperlihatkan bahwa terjadi penurunan tingkat pengeluaran rumah tangga selama pandemi COVID-19. Selama bulan Maret-Mei dilaporkan bahwa sebanyak 14,6% rumah tangga yang pengeluarannya menurun, 62,7% pengeluarannya tetap, sedangkan 22,7% mengalami kenaikan. Bulan Maret-Mei yang merupakan awal diterapkannya kebijakan PSBB telah mempengaruhi pengeluaran rumah tangga karena banyaknya penutupan sejumlah sektor-

sektor yang bergerak baik di bidang formal maupun informal.

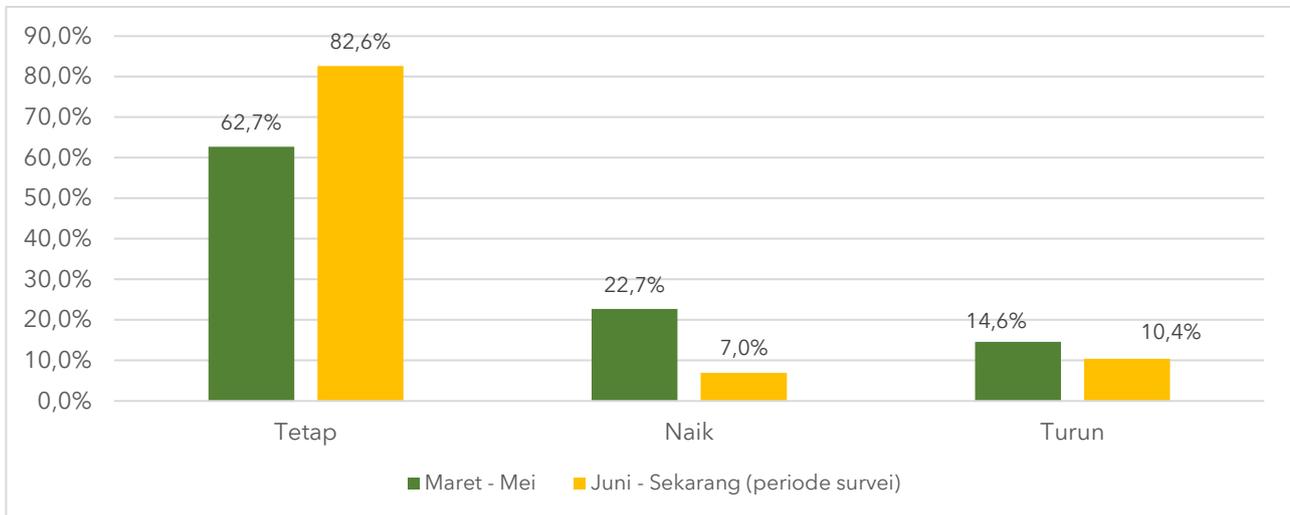
Jumlah pengeluaran rumah tangga yang menurun disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang cenderung menurun selama pandemi dan kekhawatiran rumah tangga dalam mengalokasikan pengeluarannya sehingga memiliki kecenderungan untuk mengurangi tingkat pengeluarannya.

Namun, pada Bulan Juni pemerintah mulai menerapkan masa transisi yang merupakan kelonggaran masyarakat untuk beraktivitas keluar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kondisi ini diiringi dengan pembukaan kembali tempat usaha dan banyak perusahaan yang sudah menerapkan karyawannya untuk bekerja ke kantor kembali.

Pada saat tersebut, banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor usaha besar yang sudah dapat melakukan aktivitas berjualan kembali, walaupun belum sepenuhnya normal. Kondisi ini disikapi oleh rumah tangga dengan mengalokasikan pengeluarannya lebih besar dibandingkan pada saat awal pandemi berlangsung. Kebijakan tersebut menjadikan tingkat pengeluaran rumah tangga yang menurun telah berkurang menjadi 10,4%, sedangkan

yang tingkat pengeluarannya tetap meningkat menjadi 82,6%, dan tingkat pengeluaran rumah tangga yang naik berkurang menjadi 7% (Gambar 7.).

Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah rumah tangga yang sementara dirumahkan dan mencari pekerjaan atau menganggur meningkat. Banyak sektor usaha yang kinerja sektor keuangannya menurun pada saat awal pandemi, sehingga melakukan strategi



Gambar 7. Perubahan tingkat pengeluaran rumah tangga selama pandemi COVID-19

Kebijakan PSBB yang telah diterapkan pemerintah pada Bulan Maret juga telah berdampak terhadap perubahan status pekerjaan dan pola kerja masyarakat. Imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah telah dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat dan perusahaan. Kondisi ini tercerminkan melalui peningkatan aktivitas bekerja di rumah pada Bulan Maret sampai Mei dan penurunan aktivitas bekerja di luar rumah atau di kantor. Adanya imbauan dari pemerintah untuk bekerja di rumah direspon oleh sejumlah sektor usaha untuk mengikuti kebijakan tersebut.

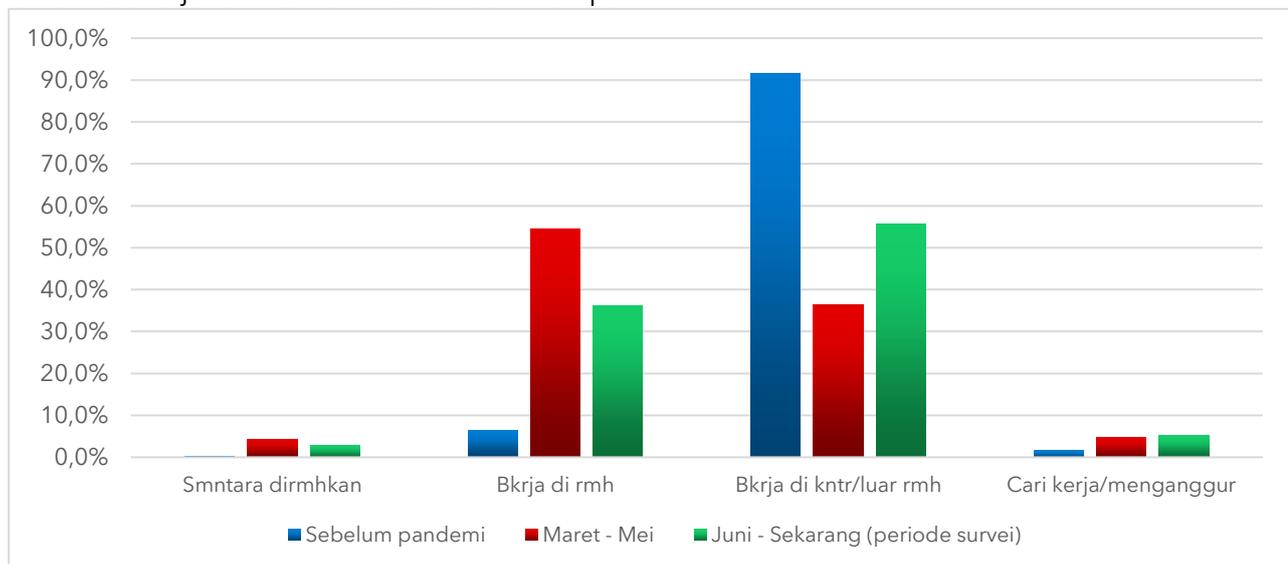
bertahan dengan merumahkan sebagian karyawannya bahkan sampai menutup usahanya. Hal ini disebabkan aktivitas perusahaannya terhambat karena pandemi berlangsung dan kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Meskipun bekerja dan belajar di rumah memiliki kecenderungan efektivitas yang lebih rendah dibandingkan bekerja dan belajar di kantor atau di sekolah, namun sektor usaha dan pendidikan tetap mengutamakan kesehatan. Mereka juga tetap berupaya untuk memaksimalkan efektivitas bekerja dan belajar di rumah, sehingga tujuan bekerja dan belajar tetap tercapai meskipun dalam kondisi yang tidak normal.

Gambar 8 menunjukkan pada Bulan Juni aktivitas bekerja di rumah mengalami penurunan dari yang semula 54,5% menjadi 36,2%. Dinamika perubahan ini disebabkan oleh adanya kebijakan masa transisi pada Bulan Juni yang menjadikan aktivitas keluar rumah lebih longgar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Fase ini merupakan kondisi awal sebagian besar rumah tangga untuk mengejar ketertinggalan dari segi ekonomi pada saat awal pandemi berlangsung. Pada saat ini banyak perusahaan yang sudah mengizinkan kembali karyawannya untuk bekerja di kantor. Pasar dan tempat

pekerjaan atau mengganggu yang cenderung meningkat selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kinerja sektor-sektor usaha masih belum pulih sepenuhnya, meskipun pemerintah telah melonggarkan aktivitas keluar rumah dengan diterapkannya periode masa transisi.

Pandemi telah mengubah pola belanja dan memasak sebagian besar rumah tangga. Membatasi interaksi orang secara langsung melalui penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun secara teratur, dan menghindari



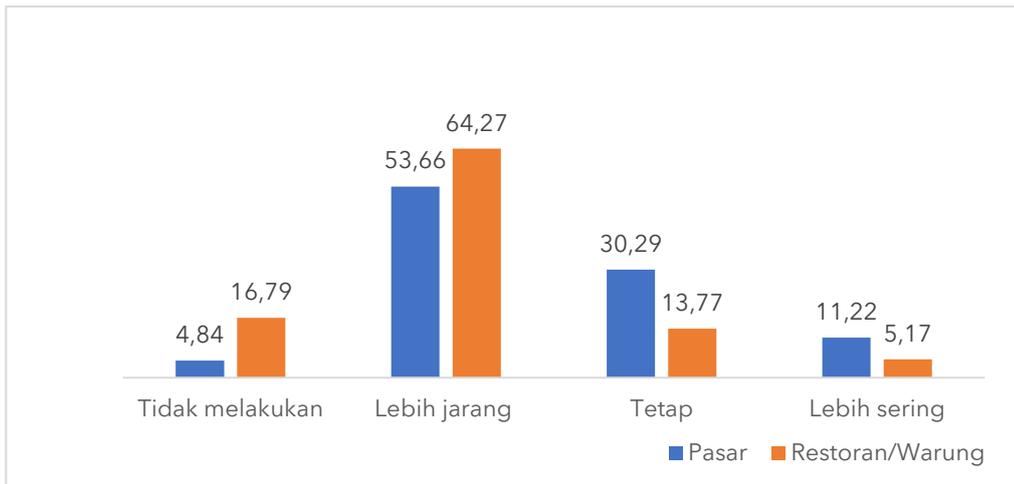
Gambar 8. Perubahan status dan pola bekerja selama pandemi COVID-19

perbelanjaan lainnya juga sudah dibuka kembali pada masa transisi, sehingga aktivitas masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut sudah bisa berjalan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini juga menjadikan aktivitas UMKM dan sektor lainnya dapat berjalan normal kembali meskipun belum pulih sepenuhnya.

Hal yang senada juga dialami oleh perubahan jumlah rumah tangga yang sementara dirumahkan. Pada Bulan Maret jumlah rumah tangga yang sementara dirumahkan meningkat menjadi 4,9%, sedangkan pada Bulan Juni menurun menjadi 2,9%. Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas mencari

kerumunan) turut berperan atas perubahan tersebut.

Rumah tangga cenderung lebih nyaman dan percaya pada makanan yang diolah sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh hampir 70% rumah tangga yang menyatakan lebih sering memasak dirumah dibandingkan sebelum pandemi. Sebaliknya hanya sekitar 6% rumah tangga yang tidak melakukan atau lebih jarang memasak dirumah. Mereka terutama adalah rumah tangga pribadi (belum menikah) dan hidup sendiri baik di rumah maupun menyewa sehingga konsumsi pangan terpenuhi dengan membeli akibat pertimbangan biaya maupun kepraktisan.



Gambar 9. Perubahan frekuensi belanja bahan pangan dan pangan jadi menurut tempat (%)

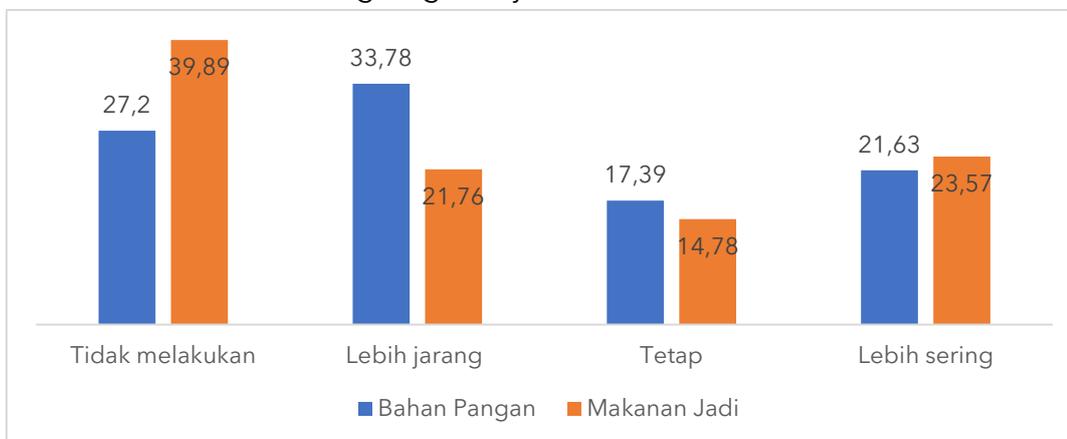
Prinsip kehati-hatian dengan menghindari interaksi langsung dalam pembelian bahan pangan diutamakan bagi rumah tangga yang biasa memasak di rumah. Pembelian bahan pangan mentah di pasar dan makanan jadi (siap saji) di warung makan atau restoran menjadi lebih jarang dilakukan.

Pembelian bahan pangan mentah di pasar semakin jarang dan bahkan tidak dilakukan oleh sekitar 60% responden. Konsumsi makanan jadi semakin jarang dilakukan oleh lebih dari 81% responden menyusul penerapan PSBB di beberapa wilayah utamanya perkotaan yang mengharuskan penutupan berbagai tempat umum termasuk restoran.

Meskipun frekuensi pembelian bahan pangan dan makanan secara langsung menjadi lebih

jarang dilakukan, namun tidak serta merta dikompensasikan kepada pembelian daring.

Hal ini berbeda dengan berbagai riset yang menunjukkan peningkatan belanja daring yang justru didominasi oleh penjualan makanan dan minuman (misal, survei BPS (2020) menunjukkan peningkatan belanja makanan secara daring sebesar 51%). Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan karakteristik konsumen dimana pembeli belanja online didominasi oleh milenial dan di wilayah perkotaan. Sementara itu, pada kelompok rumah tangga yang didominasi oleh generasi *baby boomers*, cenderung memilih memasak untuk memastikan asupan anggota rumah tangganya. Bahkan, pada beberapa rumah tangga *single*, aktivitas yang berubah dari bekerja di kantor menjadi di rumah justru



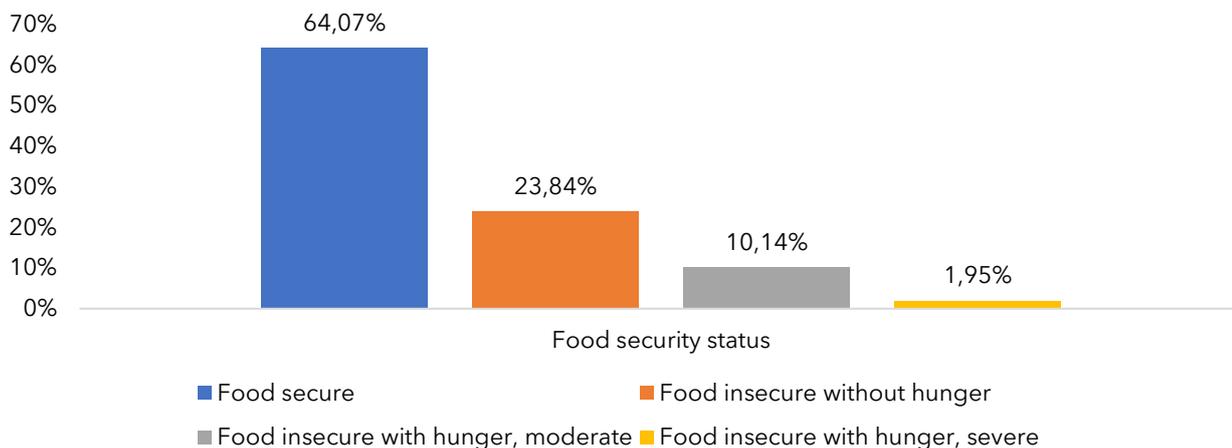
Gambar 10. Pembelian Bahan Pangan dan Makanan Jadi melalui Daring (%)

membawa pada penurunan belanja makanan jadi karena lebih banyak menghabiskan waktu dirumah.

Masih terdapat sekitar 11% rumah tangga responden yang justru meningkatkan frekuensi belanja ke pasar karena dirasa masih aman dan tidak terlalu ramai. Terdapat cukup banyak rumah tangga yang menyatakan lebih menyukai dan tetap percaya pada belanja langsung baik ke pasar maupun ke warung sayur untuk jenis bahan makanan. Beberapa pertimbangan meliputi: bahan pangan yang mudah rusak, kebebasan dalam memilih bahan pangannya secara langsung dengan pertimbangan kesegaran, dan kuantitas pembelian yang lebih fleksibel. Pembelian bahan pangan segar umumnya dilakukan diwilayah perkotaan yang dapat memastikan distribusi dan transportasi yang cepat. Sementara diwilayah pedesaan, rumah tangga membeli bahan pangan yang tidak bisa terpenuhi sendiri yang umumnya bersifat mudah rusak seperti protein hewani.

Pandemi COVID-19 membuat sektor usaha mengalami kontraksi yang membuat permintaan akan barang dan jasa menurun, sehingga berimplikasi pada kinerja usaha. Sektor usaha yang tidak mampu mengatasi gejala tersebut dengan ketersediaan sumber daya keuangan terbatas berupaya mengurangi pos pengeluaran mereka dengan cara mengurangi biaya operasional, termasuk gaji karyawan, atau merumahkan sebagian karyawan, dan kondisi lebih ekstrimnya adalah potensi kebangkrutan. Hal yang berbeda pada rumah tangga yang memiliki pendapatan stabil meskipun ekonomi melesu akibat pandemi COVID-19. Tipe rumah tangga ini biasanya mereka yang bekerja pada sektor pemerintahan atau rumah tangga yang bekerja pada unit usaha yang relatif aman dalam hal kondisi keuangannya, atau unit usaha yang tidak terdampak signifikan.

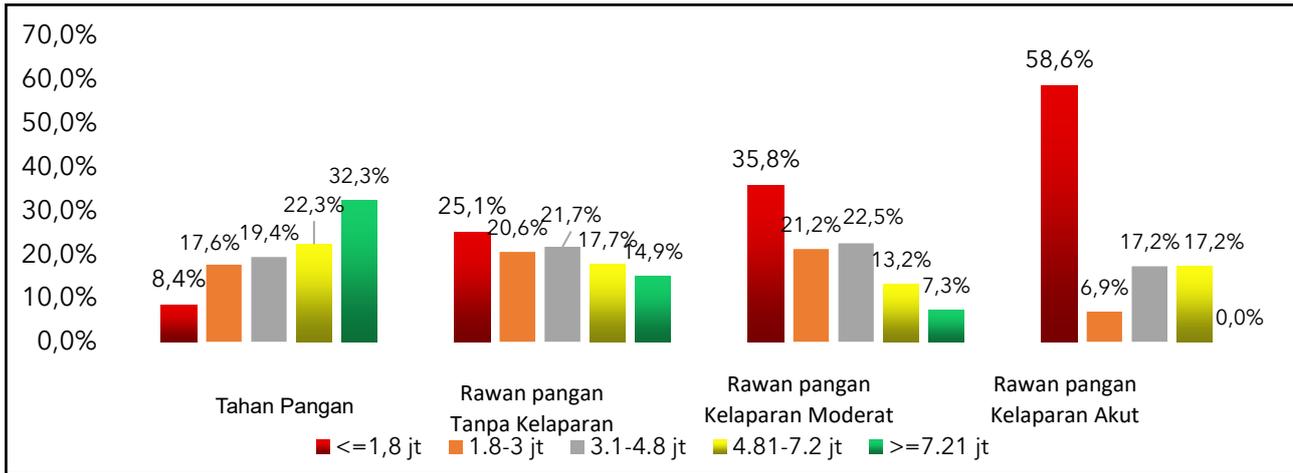
1.4. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19



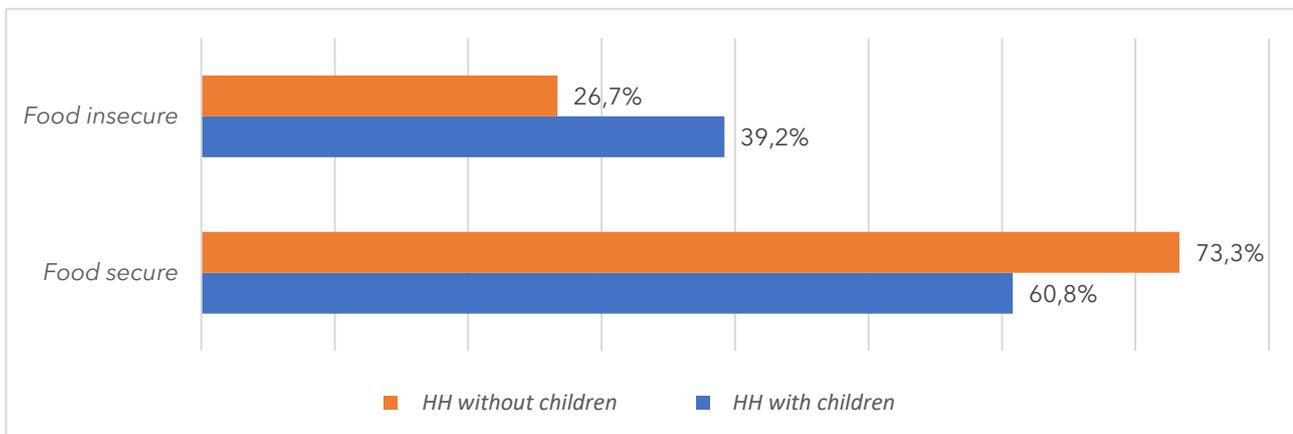
Gambar 11. Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Responden

Memahami ketahanan pangan tidak hanya sebatas dari faktor internal, yaitu tingkat pendapatan, tetapi juga faktor lainnya, seperti jejaring distribusi pangan atau kemudahan dalam memperoleh makanan.

Hal ini mengingat bahwa kondisi pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas, meskipun kebijakan Pemerintah sendiri, beberapa kegiatan diperbolehkan untuk beroperasi seperti biasa namun tetap mematuhi protokol kesehatan,



Gambar 12. Indeks Ketahanan Pangan Menurut Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan



Gambar 13. Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga dengan dan tanpa Tanggungan Anak

seperti pasar, supermarket, bank, dan sebagainya. Meskipun terjadi pembatasan ruang gerak, masyarakat yang memiliki kemampuan lebih (keuangan) atau tingkat literasi terhadap teknologi lebih tinggi, mereka cenderung memanfaatkan belanja *online* untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan mereka.

Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian metodologi, penilaian ketahanan pangan rumah tangga menggunakan empat kategori, yaitu rumah tangga tahan pangan (*food secure*) dan rumah tangga rawan pangan (*food insecure*). Untuk kategori kedua dibagi menjadi tiga kelompok,

yaitu rawan pangan tanpa kelaparan (*food insecure without hunger*), rawan pangan dengan kelaparan moderat (*food insecure with moderate hunger*), dan rawan pangan dengan kelaparan akut (*food insecure with severe hunger*). Berdasarkan hasil survei, selama periode Maret - September, mayoritas responden masih berada dalam kondisi tahan pangan, yaitu sebesar 64,07%. Sementara itu, ada sekitar 35,93% responden berada dalam kondisi rawan pangan di mana 23,84% rawan pangan tanpa kelaparan, 10,14% rawan pangan dengan kelaparan moderat, dan 1,95% rawan pangan dengan kelaparan akut.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih memiliki kemampuan untuk mengakses pangan dan ketersediaan pangan masih mencukupi. Selain itu, kelompok rumah tangga yang berada pada kondisi rawan pangan, mereka merasa khawatir untuk tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan dan mereka yang mengalami masalah akses, khususnya karena keterbatasan sumber daya finansial, kualitas dan kuantitas konsumsi pangan mereka mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Kekhawatiran ini bisa saja disebabkan karena kondisi yang tidak menentu sehingga tidak memiliki ekspektasi apakah beberapa waktu ke depan mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara normal atau seperti biasanya atau justru mengalami perubahan karena adanya perubahan pendapatan, gejolak harga, dan lain sebagainya. Hal ini juga terjadi karena selama pandemi COVID-19 seringkali masyarakat menerima informasi yang tidak relevan terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan *lockdown* atau tidak. Beberapa daerah memiliki sistem buka pasar yang tidak setiap hari sehingga menjadi kendala bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat cenderung menyimpan makanan untuk meminimalisir aktivitas di luar.

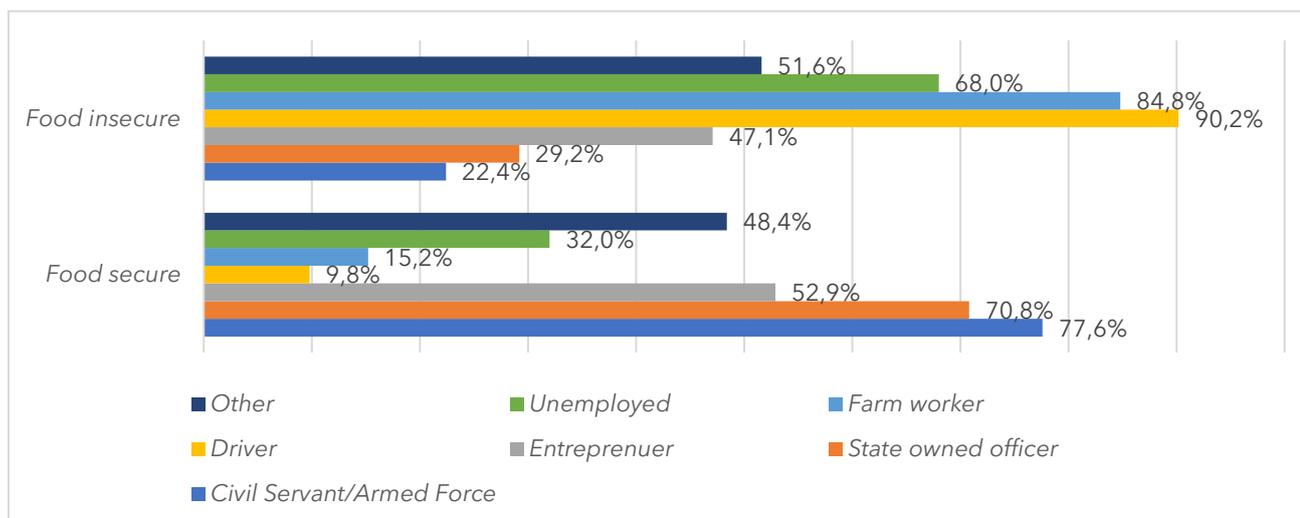
Perhitungan dari *United States Department of Agriculture* (Baquedano, 2020), Indonesia memiliki 6,5% penduduk yang rawan pangan sebelum adanya imbas COVID-19 dan meningkat menjadi 7,3% setelah dampak COVID-19 diperhitungkan pada tahun 2020. Survei LIPI tahun 2020 menunjukkan bahwa rumah tangga yang rawan pangan (*food insecure*) umumnya dengan pengeluaran rata-rata rumah tangga yang tergolong rendah (kelompok miskin), memiliki tanggungan anak, dan penghasilan yang tidak menentu. Sebaliknya, rumah tangga yang tahan pangan (*food secure*) ditunjukkan mayoritas pada kelompok responden dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga yang tergolong

tinggi (lebih dari Rp 7,2 juta per bulan), tanpa tanggungan anak, dan memiliki penghasilan yang relatif tetap.

Pengeluaran rumah tangga dapat menjadi proksi untuk mengukur pendapatan yang mencerminkan tingkat kerentanan ekonomi sebagai indikator untuk menganalisis ketahanan pangan (Pujilestari, 2020; Smith dan Subandoro, 2007). Pengeluaran rumah tangga selain dapat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketahanan pangan (Yuliana dkk, 2013), juga memiliki hubungan yang kuat dengan indikator ketahanan pangan lainnya seperti yang terindikasi dari hasil studi di Uganda oleh Smith dan Subandoro. Dengan total pengeluaran rumah tangga per bulan yang menjadi proksi pendapatan ini, studi di Uganda tersebut menunjukkan bahwa konsumsi pangan per kapita di antara masyarakat miskin (pengeluaran rendah) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat kaya (pengeluaran tinggi). Dalam hal ini, peningkatan pendapatan dianggap merupakan strategi utama untuk menguatkan ketahanan pangan.

Sejalan dengan literatur di atas, proporsi responden yang tahan pangan dari hasil survei LIPI tahun 2020 ini searah dengan besarnya pengeluaran bulanan rumah tangga (Gambar 12). Semakin rendah pengeluaran rumah tangga responden, maka semakin sedikit pula persentase responden yang tahan pangan. Akan tetapi, kondisi demikian memang tidak serta merta selalu terjadi pada setiap kasus, mengingat adanya Hukum Engel yang menyebutkan bahwa jika pendapatan naik maka jumlah pengeluaran untuk pangan naik pula tetapi jumlah pengeluaran untuk hal lainnya lebih meningkat. Artinya, persentase pendapatan yang digunakan untuk pangan (*share of total income spent on food*) dapat menurun (Baquedano, 2020; INDDX Project, 2018).

Di samping itu, terlihat pada kelompok responden yang termasuk rumah tangga



Gambar 14. Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Jenis Pekerjaan Responden

rawan pangan dengan kelaparan akut, sebagian besar ialah yang memiliki pengeluaran per bulan paling rendah pula (maksimal Rp 1,8 juta per bulan). Meskipun demikian, proporsi responden berstatus rawan pangan dengan kelaparan akut ini, yang memiliki pengeluaran menengah (Rp3,1-4,8 juta dan Rp4,8-7,2 juta) justru lebih banyak (17,2%) dibandingkan dengan yang pengeluarannya rendah, yakni antara Rp1,81-3 juta (6,9%). Hal tersebut mungkin terkait banyaknya responden dalam rumah tangga dengan anak usia di bawah 18 tahun. Persentase responden yang memiliki tanggungan anak (*household/HH with children*) lebih banyak pada kedua kelompok pengeluaran menengah tersebut (73% dan 79%), dibandingkan dengan kelompok responden yang pengeluarannya lebih sedikit (67%).

Lebih lanjut, tampak perbedaan pada IKP antara kelompok responden pada rumah tangga dengan dan tanpa anak berusia di bawah 18 tahun (Gambar 13). Seperti halnya yang terindikasi dari hasil studi di USA pada tahun 2019 (Coleman-Jensen dkk, 2020), status tahan pangan ialah lebih banyak pada proporsi rumah tangga tanpa anak (*household/HH without children*) (84,4%) dibandingkan dengan yang memiliki anak

(76,6%). Survei LIPI pada tahun 2020 ini juga menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang dalam kondisi rawan pangan mayoritas merupakan rumah tangga dengan tanggungan anak (39,2%), sedangkan kelompok responden yang tahan pangan sebagian besar ialah rumah tangga tanpa tanggungan anak (73,3%).

Pentingnya memperhatikan ketahanan pangan pada rumah tangga yang memiliki tanggungan anak ini juga ditekankan oleh Coleman-Jensen (2 Desember 2019) karena dianggap dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus di masa mendatang. Coleman-Jensen menyebutkan bahwa umumnya anak dalam rumah tangga yang rawan pangan lebih cenderung mengalami permasalahan kesehatan dan pendidikan.

Guna mengukur indeks ketahanan pangan rumah tangga yang memiliki tanggungan anak, terdapat 8 pertanyaan dalam survei mengenai berbagai perilaku dan kondisi yang mencerminkan konsumsi pangan untuk anak di dalam rumah tangga responden. Kondisi rawan pangan terjadi apabila mengalami kesulitan dalam mendapatkan atau mengkonsumsi pangan karena tidak cukup memiliki uang.

Survei LIPI tahun 2020 ini juga menunjukkan bahwa kelompok responden yang termasuk rumah tangga rawan pangan menurut klasifikasi jenis pekerjaan, sebagian besar ialah pengemudi, buruh tani, dan pengangguran (Gambar 14). Sebanyak 90,2% dari total responden pengemudi (*driver*) berstatus rumah tangga rawan pangan. Hal ini seperti yang terindikasi dari studi lainnya (Abdullah dkk, 2019; Faridi dan Wadood, 2010) bahwa penerima upah harian, baik yang bekerja di sektor pertanian maupun yang non-pertanian, ialah yang paling terancam berstatus rawan pangan. Penerima upah harian menjadi yang paling terkendala karena pekerjaannya yang tidak menentu sehingga berdampak negatif pula pada konsumsi pangannya. Jenis pekerjaan bersama-sama dengan indikator lainnya, yakni usia kepala rumah tangga, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan, terindikasi berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga miskin (Susilowati, 2014).

Kemudian, 84,8% dari total responden buruh tani/petani/nelayan (*farm worker*) berstatus rumah tangga rawan pangan yang juga perlu mendapat perhatian utama. Kelompok ini yang sebenarnya merupakan bagian penting dalam rantai pasokan pangan (ILO, n.d) serta menjadi kunci penggerak pertumbuhan dan penurunan kemiskinan (Gomez Y Paloma dkk, 2020), namun justru mengalami kesulitan dalam konsumsi pangan.

Studi lainnya telah menunjukkan pula bahwa rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang bekerja sebagai petani termasuk variabel yang signifikan hubungannya dengan kerawanan pangan (Mohammadzadeh, 2010). Gomez Y Paloma dkk (2020) juga menyebutkan bahwa pendapatan dari sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan eksternal, berbeda dengan pendapatan dari luar sektor pertanian yang lebih stabil sehingga relatif lebih tahan pangan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh seorang responden berdasarkan hasil wawancara (UM, Oktober 2020) bahwa

pendapatannya sebagai petani mengalami penurunan, akibat selama pandemi ini harga jual produk pertaniannya turun. Meskipun sebagai petani ia dapat memenuhi kebutuhan pangan utama dengan mudah, terutama beras, namun yang menjadi kesulitan ialah dalam memenuhi kebutuhan untuk anak, terutama susu.

Kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran (*unemployed*) termasuk yang menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi kerawanan pangan (Abdullah dkk, 2019; Loopstra dan Tarasuk, 2013). Hasil survei LIPI menunjukkan bahwa 68% dari total responden yang menjadi pengangguran saat periode survei atau di masa pandemi COVID-19 ini berstatus rumah tangga rawan pangan. Dominasi responden pengangguran berstatus rawan pangan dengan proporsi yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok responden pengemudi dan buruh tani ini mungkin salah satunya disebabkan sebagian responden pengangguran yang baru kehilangan pekerjaan saat pandemi ini. Dengan kata lain, kemungkinan masih memiliki alternatif sumber finansial untuk memenuhi kebutuhan pangan. Seperti hasil wawancara dengan salah satu responden (UB, 23 Oktober 2020) bahwa setelah diberhentikan dari pekerjaannya di hotel akibat pandemi ini, ia telah memperoleh bantuan periode Agustus-September 2020 berupa uang yang ditransfer ke rekening senilai Rp 1,2 juta, dari total bantuan Rp 2,4 juta yang akan diperolehnya. Dari bantuan uang yang telah diterimanya tersebut, 50% untuk membayar cicilan pinjaman ke bank dan 25% atau sekitar Rp 300 ribu untuk membeli sembako.

Sementara itu, kelompok responden PNS/TNI/Polri (*civil servant/armed force*) dan pegawai swasta/BUMN (*state-owned officer*) memiliki proporsi rumah tangga tahan pangan yang tertinggi (77,6% dan 70,8%). Hal ini mungkin erat kaitannya dengan sumber pendapatan yang relatif stabil yang diperoleh oleh pegawai pemerintah (Abdullah dkk, 2019) dan pegawai swasta. Selanjutnya, kelompok

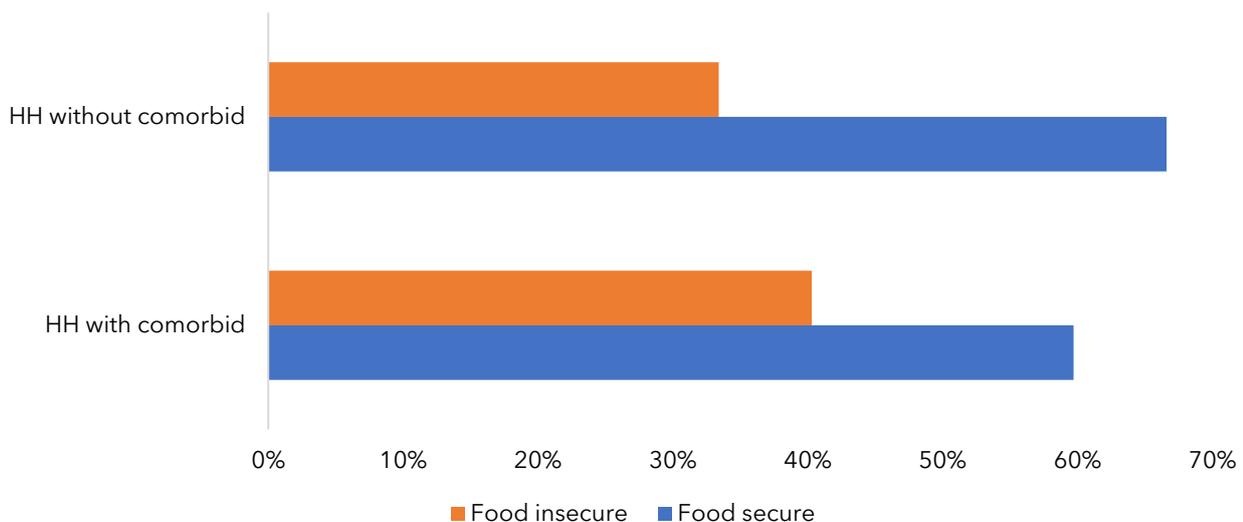
responden dengan proporsi rumah tangga tahan pangan yang menempati urutan ketiga ialah wirausaha (*entrepreneur*). Hasil wawancara dengan seorang responden yang berwirausaha (AA, Oktober 2020) terungkap bahwa bantuan UMKM dari pemerintah berupa uang tunai per bulan senilai Rp 600 ribu dapat digunakannya untuk membeli bahan pangan, termasuk telur, gula, dan minyak.

Di samping itu, seperti yang diungkapkan oleh Faridi dan Wadood (2010) bahwa responden dengan sumber penghasilan dari berwirausaha (*self-employed*) baik di sektor pertanian maupun non-pertanian ialah yang relatif lebih tahan pangan. Kemungkinan ini akibat kemampuan mereka untuk menyesuaikan pekerjaan atau level usahanya sehingga dapat mengkompensasi sebagian dampak apabila ada peningkatan biaya untuk konsumsi pangan.

1.5. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DENGAN COMORBID DAN KASUS POSITIF COVID-19

Pola konsumsi pangan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi tentunya tergantung juga pada beberapa hal, seperti jenis kelamin, usia, atau bahkan kondisi kesehatan. Terkait dengan kondisi kesehatan, seseorang memiliki pola konsumsi yang

memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Selain itu, kondisi rumah sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin karena rawan tertular COVID-19 membuat mereka yang memiliki permasalahan



Gambar 15. Status Ketahanan Pangan dan Kondisi Kesehatan Responden

berbeda di mana ada beberapa jenis makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan dalam rangka menjaga kesehatannya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 di mana menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi hal yang paling utama terlebih jika sebelumnya telah memiliki riwayat kesehatan yang tidak baik, seperti penyakit jantung, diabetes, asthma, dan lain sebagainya, tentu

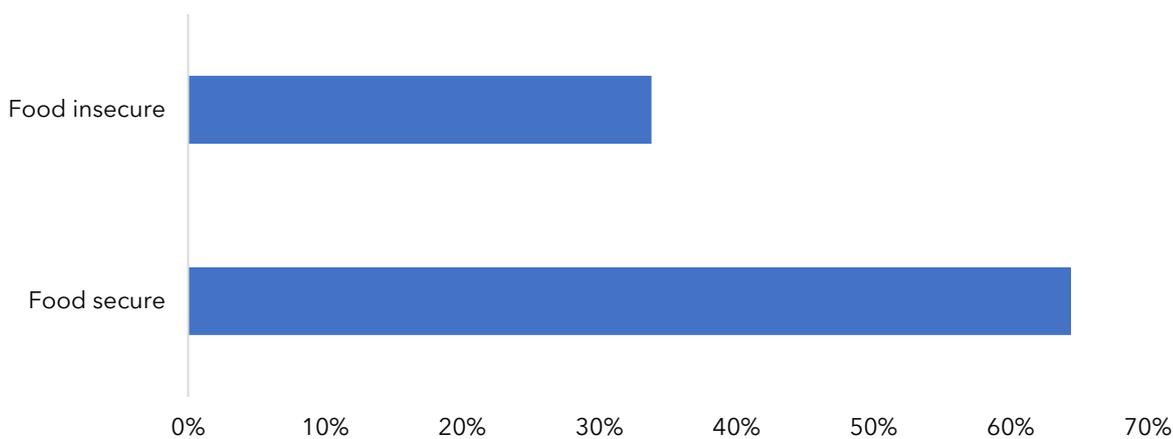
kesehatan dituntut untuk dapat lebih mandiri, khususnya bagaimana memenuhi kebutuhan konsumsi makanan yang sehat untuk meminimalisir kunjungan ke dokter. Survei yang dilakukan berupaya melihat kondisi tersebut, yaitu apakah rumah tangga yang memiliki riwayat penyakit atau *comorbid* terdampak dalam pemenuhan kebutuhan konsumsinya. Dari hasil survei

menunjukkan bahwa baik rumah tangga dengan dan tanpa ada *comorbid*, berada dalam kondisi tahan pangan, yaitu masing-masing sebesar 59,7% dan 66,6%. Artinya, kondisi pangan di Indonesia masih relatif aman di mana pangan yang tersedia dapat diakses dan dimanfaatkan baik oleh mereka yang memiliki masalah penyakit bawaan atau tidak.

Selanjutnya, tidak hanya terkait dengan *comorbid*, rumah tangga dengan anggota keluarga yang sedang hamil pun penting untuk diketahui status ketahanan pangannya. Hal ini mengingat bahwa ibu hamil perlu untuk mengkonsumsi kebutuhan nutrisi sebaik mungkin agar dapat melahirkan bayi yang sehat. Hasil survei menunjukkan bahwa kondisi 64,4% rumah tangga dengan anggota keluarga yang sedang hamil berada pada level tahan pangan. Artinya rumah tangga tersebut masih memiliki kemampuan yang baik dalam pemenuhan gizi ibu hamil.

langsung. Namun, data hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 58,8% responden yang terinfeksi COVID-19 dengan melakukan kewajiban isolasi mandiri masih dapat memenuhi kebutuhan pangannya atau dengan kata lain, mereka berada dalam kondisi tahan pangan. Dari hasil temuan ini, responden tersebut masih memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan belanja online. Pemenuhan kebutuhan dapat juga dibantu oleh tetangga sekitar mengingat bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat melakukan tolong-menolong kepada mereka yang terinfeksi COVID-19 dengan menyediakan makanan jadi atau bahan-bahan makanan yang diberikan tanpa melakukan interaksi langsung.

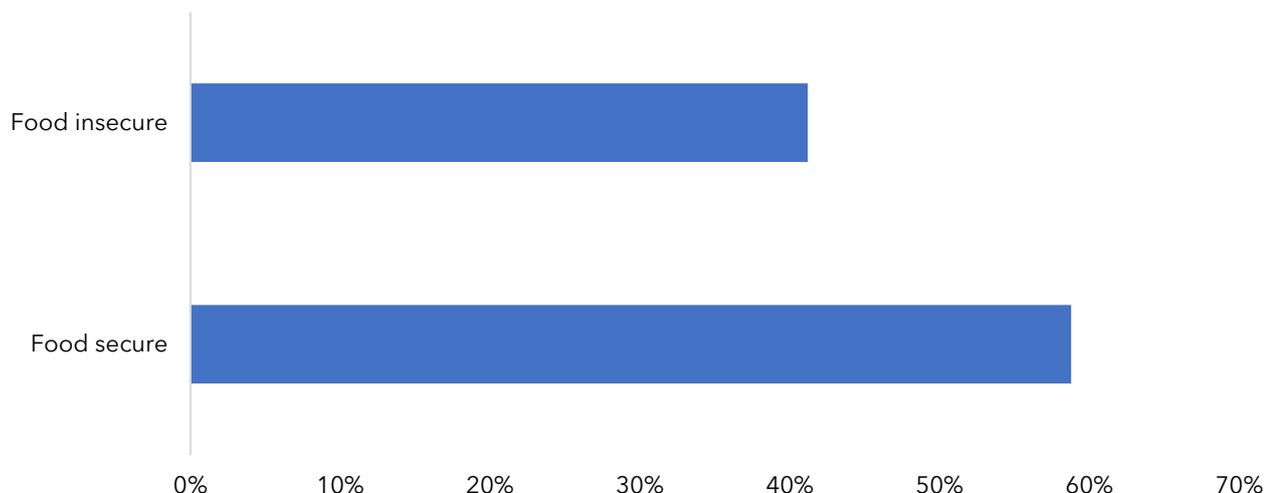
Temuan yang cukup menarik bahwa hasil survei menunjukkan masyarakat dengan kondisi tahan pangan sebanyak 58,8% dari total responden yang anggota keluarganya terkena COVID-19. Sedangkan, masyarakat



Gambar 16. Status Ketahanan Pangan dan Rumah Tangga dengan Anggota yang Sedang Hamil

Terakhir, dari sejumlah rumah tangga yang menjadi responden survei, terdapat responden yang terinfeksi COVID-19. Sebagaimana diketahui, mereka yang terinfeksi COVID-19, jika melakukan isolasi mandiri, tentunya akan menghadapi masalah dalam pemenuhan kebutuhan, khususnya bagi mereka yang terbiasa berbelanja secara

dengan rawan pangan tanpa kelaparan, rawan pangan dengan kelaparan moderat, dan rawan pangan dengan kelaparan akut memiliki angka kasus terjangkit COVID-19 lebih rendah masing-masing 29,4%; 11,8%; dan 0%, bahkan rumah tangga rawan pangan dengan kelaparan akut tidak ada yang menyatakan anggota keluarganya pernah atau sedang



Gambar 17. Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga dengan dengan Anggota yang Terinfeksi COVID-19

terkena COVID-19. Apabila didalami lagi, terdapat 55,6% masyarakat tahan pangan memiliki pengeluaran rumah tangga per bulan dengan kisaran Rp 4,81 juta ke atas. Artinya, responden yang tingkat kesejahteraannya lebih baik justru memiliki probabilitas yang cukup besar tertular COVID-19. Namun

demikian perlu diingat bahwa COVID-19 dalam penularannya tidak mengenal status sosial dan status ekonomi dari seseorang sehingga segala bentuk kewaspadaan dan antisipasi harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.6. STRATEGI PEMENUHAN PANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat dengan kriteria rawan pangan dengan kelaparan moderat dan rawan pangan dengan kelaparan akut mengalami goncangan yang cukup dalam. Pasalnya, pada kelompok kelaparan moderat dan akut terdapat masing-masing sejumlah 16% dan 25% responden yang menyatakan menjual asetnya untuk dapat makan. Sejalan dengan hal itu, responden yang bekerja sebagai petani (16,1%), pengemudi (15,7%), dan pengangguran (20,4%), mengalami tekanan yang cukup besar hingga mereka harus menjual aset.

Selain itu, penggunaan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pangan menimpa seluruh tingkat masyarakat baik yang memiliki ketahanan pangan, rawan pangan tanpa kelaparan, rawan pangan dengan kelaparan moderat dan akut.

Hasil survei menunjukkan adanya sebanyak 18% dan 13% kelompok rawan pangan dengan kelaparan moderat dan akut yang harus berhutang untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Berdasarkan jenis pekerjaan, kelompok rumah tangga yang bekerja sebagai pengemudi tercatat sebanyak 18,6% harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Di tengah ketidakpastian kondisi sosial dan ekonomi, kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari COVID-19 terbilang cukup baik. Strategi pangan yang dapat meningkatkan imunitas menjadi pilihan favorit pada semua kalangan masyarakat.

Konsumsi empon-empon¹², protein hewani, sayuran, dan buah-buahan menempati urutan tertinggi masing-masing sebesar 11,9%; 13,4%; 14,4%; dan 14,7% responden.

Di sisi lain, hasil survei terkait dengan konsumsi masyarakat berdasarkan nilai pengeluaran perbulan, menunjukkan masyarakat dengan penghasilan lebih

masyarakat dengan tingkat pengeluaran Rp4,81-7,2 juta per bulan, jumlah responden yang mengonsumsi sayuran lebih rendah dari masyarakat yang berpengeluaran sebesar Rp3,1-4,8 juta, dan \geq Rp7,21 juta dan jumlahnya sama dengan masyarakat yang berpengeluaran Rp1,8-3 juta per bulan.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara

| Strategi | Status Ketahanan Pangan | | | |
|---|-------------------------|------|------|------|
| | TP | RPTK | RPKM | RPKA |
| Jual aset | 5% | 9% | 16% | 25% |
| Ambil tabungan | 35% | 30% | 23% | 20% |
| Pinjam makanan dari tetangga atau saudara | 1% | 2% | 4% | 4% |
| Jual hasil pertanian | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Hutang | 3% | 10% | 18% | 13% |
| Konsumsi pangan murah | 18% | 14% | 8% | 5% |
| Minta bantuan saudara atau keluarga | 1% | 4% | 7% | 9% |
| Minta bantuan pemerintah | 1% | 3% | 7% | 7% |
| Memanfaatkan cadangan pangan | 12% | 9% | 6% | 5% |
| Beli pangan lokal yang lebih murah | 23% | 16% | 8% | 7% |

Tabel 1. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga di Masa Pandemi COVID-19

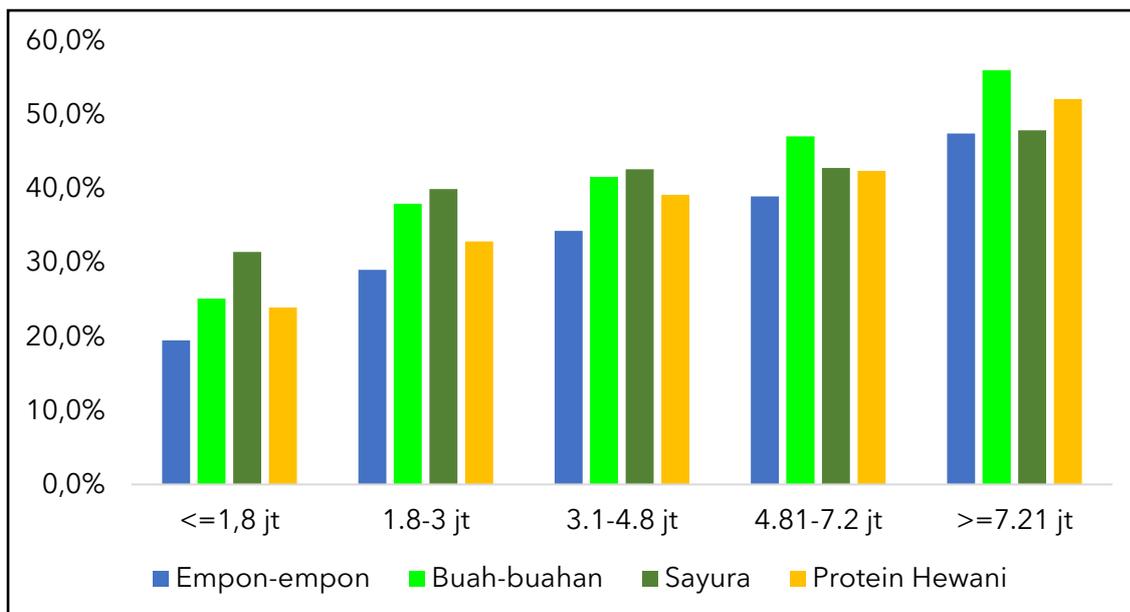
Catt: TP= tahan pangan, RPTK rawan pangan tanpa kelaparan, RPKM rawan pangan, RPKA= rawan pangan dengan kelaparan akut.

tinggi cenderung mengonsumsi empon-empon, buah-buahan, dan protein hewani yang lebih banyak dibandingkan masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah. Sedangkan, konsumsi sayuran cenderung mengalami peningkatan dari kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran konsumsi per bulannya <Rp1,8 juta; Rp1,8-3 juta; 3,1-4,8 juta, dan \geq Rp7,21 juta. Namun, kelompok

keseluruhan masyarakat dengan pendapatan lebih rendah cenderung mengonsumsi empon-empon, buah-buahan, dan protein hewani lebih sedikit, kecuali untuk konsumsi sayuran. Tentu gambaran ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial menentukan persentase konsumsi yang lebih besar berdasarkan hasil survei.

¹² Sejenis minuman herbal yang komposisinya bisa terdiri dari rimpang (*rhizoma*, batang, akar) ramuan

jahe, kunyit, temulawak dan semacamnya dan dipercaya mampu meningkatkan imunitas tubuh

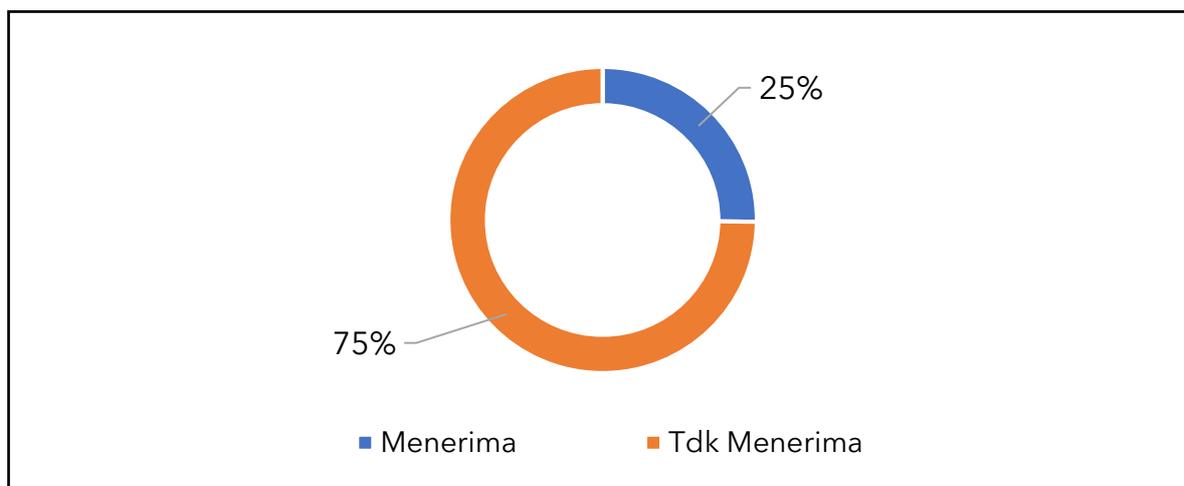


Gambar 18. Konsumsi Pangan Favorit Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19

1.7. BANTUAN SOSIAL DI PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan beberapa problem sosial-ekonomi di masyarakat seperti; angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang meningkat. Untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun paket sembako (bantuan non-tunai).

Program bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni. Kemudian, bantuan non-tunai berupa paket sembako dengan nilai sebesar Rp 300.000 juga dikururkan sejak awal pandemi COVID-19. Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun non-BLT dari Pemerintah Pusat diharapkan mampu menjaga daya beli dan membantu ketahanan pangan masyarakat di tengah



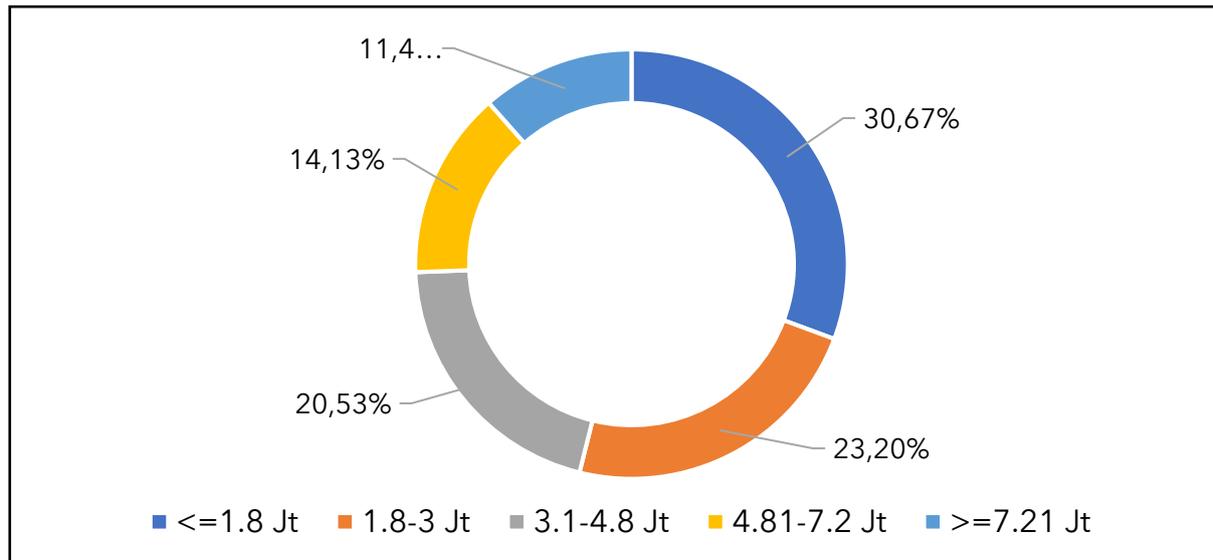
Gambar 19. Penerima bantuan Sosial Selama Masa Pandemi COVID-19

pandemi, khususnya masyarakat dengan pengeluaran rendah. Selain pemerintah, LSM, Komunitas, perusahaan swasta juga melaksanakan program bantuan sosial baik tunai dan non-tunai.

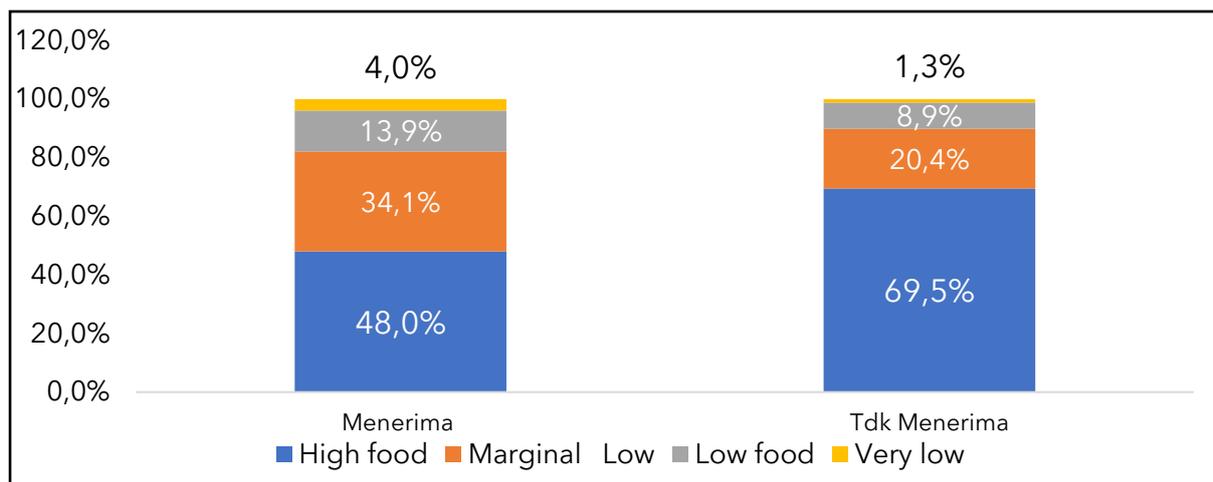
Hasil survei LIPI menghasilkan temuan bahwa 75% responden tidak menerima bantuan sosial, sedangkan 25% menerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19.

diterima selama pandemi COVID-19 baik berupa uang tunai maupun non-tunai (sembako) yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah.

Dari 25% rumah tangga penerima manfaat, 74,4% diantaranya merupakan rumah tangga dengan pengeluaran kurang dari Rp 4,8 juta per bulan dengan rincian sebagai berikut; 30,67% merupakan rumah tangga



Gambar 20. Penerima bantuan Sosial Selama Masa Pandemi COVID-19 berdasarkan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan



Gambar 21. Kondisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial Selama Masa Pandemi COVID-19

Bantuan sosial yang dimaksudkan dalam survei ini adalah jenis bantuan yang

dengan pengeluaran kurang dari Rp 1,8 juta/bulan, 23,20% rumah tangga dengan

pengeluaran diatas Rp 1,8 juta tetapi tidak lebih dari Rp 3 juta/bulan, dan terakhir sebanyak 20,53% rumah tangga dengan pengeluaran Rp 3,1 juta - Rp 4,8 juta/bulan. Hal ini menunjukkan penerima bantuan sosial sudah menysasar rumah tangga yang rentan miskin.

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial mayoritas berada pada status rumah tangga tahan pangan yaitu 48%. Kemudian 34,1% penerima bantuan tunai dan non-tunai berada di status rumah tangga dengan rawan pangan tanpa kelaparan. Lebih lanjut, 13,9% penerima bantuan sosial berada pada status rawan pangan dengan kelaparan moderat, terakhir sebanyak 4% rumah tangga penerima manfaat berada pada status rawan pangan dengan kelaparan akut. Hal ini menunjukkan, rumah tangga dengan status rawan pangan dengan kelaparan akut belum menjadi kelompok mayoritas penerima bantuan sosial baik tunai dan non-tunai. Padahal, rumah tangga dengan kondisi ini sangat rawan dalam menghadapi goncangan sosial dan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

1.8. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI merekomendasikan dan mendukung beberapa langkah jangka pendek dan jangka menengah yang memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti pemerintah sebagai berikut:

Pertama, mendukung Kementerian Sosial untuk tetap melanjutkan program perlindungan sosial sepanjang tahun 2021 dengan target dan sasaran yang lebih akurat serta mekanisme penyaluran bantuan yang lebih efisien. Pemberian bantuan dalam bentuk barang (sembako) yang telah menimbulkan permasalahan hukum bisa digantikan dengan *cash transfer* kepada rekening penerima bantuan

Hasil survei LIPI juga menunjukkan bahwa rumah tangga bukan penerima manfaat bantuan sosial didominasi mayoritas rumah tangga dengan klasifikasi tahan pangan sebanyak 69,5%. Kemudian, 20% non-penerima bantuan merupakan rumah tangga dengan rawan pangan tanpa kelaparan. Lebih lanjut, 8,9% non-penerima bantuan merupakan berada pada status rawan pangan dengan kelaparan moderat, terakhir sebanyak 1,3% responden yang tidak menerima bantuan berada pada status rawan pangan dengan kelaparan akut.

Intervensi pemerintah dalam berbagai skema bantuan sosial untuk mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat selama pandemi sangat membantu masyarakat penerimanya. Kerentanan pangan rumah tangga cukup erat dengan status pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal, maka program bantuan sosial perlu disempurnakan agar rumah tangga penerima manfaat kian tepat sasaran dan ketahanan pangannya terjaga terutama rumah tangga dengan status kelaparan akut.

sehingga dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara fleksible oleh masyarakat.

Kedua, Kementerian Dalam Negeri perlu menyempurnakan data *Single Identity Number (SIN)* bagi kebutuhan program *Social Safety Net (SSN)* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga *database* yang dimiliki oleh setiap instansi terkait bisa selalu ter-update dengan adanya perubahan data penerima bantuan termasuk dalam menjangkau kemungkinan adanya tambahan masyarakat yang seharusnya juga berhak menerima bantuan pemerintah di masa depan.

Ketiga, Kementerian Pertanian tetap meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dengan mengupayakan pencegahan kluster COVID-19 di sektor pertanian serta semakin memperluas areal tanam pada komoditi pangan strategis dan komoditi pangan yang selama ini lebih banyak mengandalkan impor. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung program *food estate* tidak hanya untuk produksi beras tetapi juga komoditi pangan lainnya, termasuk bagi peternakan dan perikanan.

Keempat, Bulog harus dioptimalkan perannya pada penguatan kapasitas logistik komoditi pangan strategis yang dapat ditetapkan melalui peraturan pemerintah

dalam menjaga keseimbangan permintaan dan penawarannya.

Kelima, Kementerian Kesehatan dan Badan Ketahanan Pangan harus semakin mengedukasi masyarakat terkait dengan diversifikasi pangan lokal tidak saja untuk meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga mencapai keseimbangan gizi rumah tangga.

Keenam, Bappenas dan BPS perlu menyusun dan melaksanakan survei dan monitoring ketahanan pangan di level rumah tangga melalui SUSENAS untuk memperoleh data dan informasi yang lebih detail dibandingkan data indeks ketahanan pangan secara agregat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zhou, D., Shah, T., Ali, S., Ahmad, W., Din, I. U., & Ilyas, A. (2019). Factors affecting household food security in rural northern hinterland of Pakistan. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 18(2), 201-210.
- Bank Dunia, 2020, Indonesian Economic Prospects: Towards a secure and fast recovery, diunduh dari: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34930/Indonesia-Economic-Prospects-Towards-a-Secure-and-Fast-Recovery.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Bappenas, (2020a). Outlook Pembangunan 2021: Outlook Ekonomi, disampaikan pada Webinar Outlook Pembangunan 2021 pada tanggal 22 Desember 2020, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta
- Bappenas, (2020b). Outlook Pembangunan 2021: Outlook Pangan dan Energi, disampaikan pada Webinar Outlook Pembangunan 2021 pada tanggal 22 Desember 2020, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta
- Bappenas, (2020c). Outlook Pembangunan 2021: Outlook Pembangunan Sosial, disampaikan pada Webinar Outlook Pembangunan 2021 pada tanggal 22 Desember 2020, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta
- Baquedano, F., Christensen, C., Ajewole, K., & Beckman, J. (2020). International Food Security Assessment, 2020-30, GFA-31, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, August 2020.
- Bickel, G, et al., USDA (2000), Guide to measuring households food security, USDA, March.
- BPS, 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020, Berita Resmi Statistik, No. 85/11/Th. XXIII, 5 November 2020, diunduh dari: <file:///C:/Users/estal/Downloads/BRSbrsInd-20201105113841.pdf>.
- Coleman-Jensen, A. (2 Desember 2019). Food Insecurity Among Children Has Declined Overall But Remains High for Some Groups. <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2019/december/food-insecurity-among-children-has-declined-overall-but-remains-high-for-some-groups/>. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Coleman-Jensen, A., Rabbitt, M. P., Gregory, C. A. & Singh, A. (2020). *Statistical Supplement to Household Food Security in the United States in 2019*, AP-084, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, September 2020.
- Faridi, R., & Wadood, S. N. (2010). An econometric assessment of household food security in Bangladesh. *The Bangladesh Development Studies*, 97-111. <https://www.jstor.org/stable/23339854>.
- Gomez y Paloma, S., et al. (eds.), (2020). *The Role of Smallholder Farms in Food and Nutrition Security*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42148-9_1.

- Hasil survei sosial demografi dampak COVID 19, BPS, diambil dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/01/669cb2e8646787e52dd171c4/hasil-survei-sosial-demografi-dampak-COVID-19-2020.html>.
- ILO (International Labour Office). (n.d.). Decent Work for Food Security: An ILO Sectoral Programme. Sectoral Activities Department (SECTOR), ILO.
- INDDEX Project. (2018). Data4Diets: Building Blocks for Diet-related Food Security Analysis. Tufts University, Boston, MA. <https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets>. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Loopstra, R., & Tarasuk, V. (2013). Severity of household food insecurity is sensitive to change in household income and employment status among low-income families. *The Journal of nutrition*, 143(8), 1316-1323. doi:10.3945/jn.113.175414.
- Mohammadzadeh, A., Dorosty, A., & Eshraghian, M. (2010). Household food security status and associated factors among high-school students in Esfahan, Iran. *Public Health Nutrition*, 13(10), 1609-1613. doi:10.1017/S1368980010000467.
- Pujilestari, T. (2020). *Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Susilowati, H. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kecamatan Srandakan Bantul. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- United Nation, (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, United Nation, tersedia online di <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>, diakses tanggal 15 September 2020
- Yuliana, P., Zakaria, W. A., & Adawiyah, R. (2013). Ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(2).

SUSUNAN REDAKSI POLICY PAPER

TIM PENGARAH

Tri Nuke Pudjiastuti
(Deputi Bidang IPSK - LIPI)

Agus Eko Nugroho
(Kepala Pusat Penelitian Ekonomi)

Carunia Mulya Firdausy

Latif Adam

Maxensius Tri Sambodo

TIM PENULIS

Editor:

Chitra Indah Yuliana, Achsanah Hidayatina, Purwanto
dan Esta Lestari

Koordinator Tim Penyusun Policy Paper:

Purwanto

Anggota:

Esta Lestari

Chitra Indah Yuliana

Achsanah Hidayatina

Felix Wisnu Handoyo

Nur Firdaus

Atika Zahra Rahmayanti

Eka Nurjati

Bintang Dwitya Cahyono

Rio Novandra

Alan Ray Farandy

LAY OUT

Tim Penulis

Policy Paper

**STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19
TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA: REKOMENDASI
BERDASARKAN HASIL SURVEI DARING SEPTEMBER-OKTOBER 2020**

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Ekonomi, Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan
Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Gedung Widya Graha Lt. 4 & 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10
Jakarta Selatan, 12710

ISBN 978-602-6303-16-5



 www.ekonomi.lipi.go.id

 [ekonomi_lipi](https://www.instagram.com/ekonomi_lipi)

 [p2ekonomi lipi](https://www.youtube.com/p2ekonomi)

 [ekonomiLIPi](https://www.facebook.com/ekonomiLIPi)